SINERGI KECAMATAN DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM DETEKSI DINI KONFLIK SOSIAL POLITIK DI WILAYAH KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Luqyana Rahadatul Aisy
NPP.33.0648
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: Luqyana2908@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Anwar Rosshad, SH, M.Si
Email: rosshadanwar@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The author focuses on the problem of the persistently high potential for socio-political conflict in East Lombok Regency, where the conflict trend shows dynamic fluctuations with a significant increase in 2025. Sikur Sub-district, as an area with a high level of community heterogeneity, contributes to these dynamics. In this context, the early detection function becomes an important instrument to prevent conflict escalation. However, the early detection mechanism involving synergy between Sikur Sub-district and the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) of East Lombok Regency still faces various challenges, such as coordination and information flow between institutions. This condition indicates that the implementation of early detection in Sikur Sub-district has not been running optimally and requires further study.* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze the implementation of early detection of socio-political conflict in Sikur Sub-district, East Lombok Regency.* ***Method:*** *This research employs a post-positivism paradigm with a descriptive qualitative method. Data collection techniques were conducted through semi-structured interviews, observation, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model. Informants were determined through purposive sampling and snowball sampling techniques.* ***Result/Findings:*** *The results show that the implementation of early detection of socio-political conflict in Sikur Sub-district has not been optimal across the three dimensions: information collection, information analysis, and response. There are no standardized standard operating procedures (SOP), conflict recording has temporarily stopped since 2022, and monitoring tends to be conducted when reports are received. Conclusion: The implementation of early detection of socio-political conflict in Sikur Sub-district still requires various improvements such as formulating early detection SOPs, reactivating routine conflict recording and reporting, and restructuring the hierarchical information flow.*

Keywords: *Early Detection; Kesbangpol; Socio-Political Conflict; Sub-district; Synergy*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Penulis berfokus pada permasalahan masih tingginya potensi konflik sosial politik di Kabupaten Lombok Timur, di mana tren konflik masih menunjukkan fluktuasi yang dinamis dengan peningkatan signifikan pada tahun 2025. Kecamatan Sikur sebagai salah satu wilayah dengan tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi turut berkontribusi terhadap dinamika tersebut. Dalam konteks ini, fungsi deteksi dini menjadi instrumen penting untuk mencegah eskalasi konflik. Namun demikian, mekanisme deteksi dini yang melibatkan sinergi antara Kecamatan Sikur dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi berbagai tantangan seperti koordinasi dan alur informasi antar lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi dini di Kecamatan Sikur belum berjalan secara optimal dan memerlukan kajian lebih mendalam. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan deteksi dini konflik sosial politik di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan paradigma *post-positivisme* dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi dini konflik sosial politik di Kecamatan Sikur belum optimal pada ketiga dimensi yaitu pengumpulan informasi, analisis informasi, dan respon. Belum terdapat standar operasional prosedur (SOP) baku, pencatatan konflik terhenti sementara sejak tahun 2022, dan pemantauan cenderung dilakukan ketika ada laporan masuk. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan deteksi dini konflik sosial politik di Kecamatan Sikur masih belum berjalan optimal dan memerlukan berbagai penyempurnaan. Adapun saran penelitian ini yakni penyusunan SOP deteksi dini, pengaktifan kembali pencatatan dan pelaporan konflik secara rutin, serta penataan alur informasi yang lebih berjenjang.

Kata Kunci: Deteksi Dini; Kecamatan; Kesbangpol; Konflik Sosial Politik; Sinergi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik sosial politik merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam dinamika masyarakat di negara-negara berkembang yang memiliki tingkat heterogenitas sosial dan politik yang tinggi (Soekanto, 2017). Wieviorka (2013) berpendapat bahwa konflik sosial pada dasarnya adalah sebuah "hubungan" (*relationship*) antara aktor-aktor yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan tujuan, yang membedakannya dari perilaku perang atau kekerasan yang bersifat disruptif. Hal ini diperkuat oleh temuan Indra et al. (2019) yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat polarisasi pendapatan, fragmentasi etnis, dan ketimpangan ekonomi berkorelasi signifikan dengan meningkatnya probabilitas konflik di provinsi-provinsi di Indonesia. Menurut (Eviany, 2019), konflik politik muncul sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, dan distribusi kekuasaan di antara aktor-aktor dalam kehidupan politik.

Konflik pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar, namun apabila tidak dikelola secara efektif dapat berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan serta kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan mekanisme deteksi dini yang efektif, terkoordinasi, dan responsif guna mencegah eskalasi konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan terbuka. Implementasi deteksi dini konflik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang stabil, meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data potensi kerawanan di daerah. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa jumlah peristiwa konflik di Indonesia terus meningkat secara signifikan, yaitu 31 konflik pada tahun 2019, 71 konflik pada tahun 2020, dan 138 konflik pada tahun 2021. Mayoritas konflik tersebut terkait dengan isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya (ANTARA News, 2022). Sementara itu, Alexandra dan Satria (2023) melaporkan bahwa terdapat 1.114 insiden kekerasan kolektif yang sebagian besar berkaitan dengan dinamika politik lokal. Selain itu, sistem peringatan dini yang efektif memerlukan integrasi data dan kolaborasi lintas lembaga untuk mencegah eskalasi kekerasan (Hegre et al., 2019)

Sejalan dengan implementasi deteksi dini konflik, Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan kewaspadaan dini di daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Kebijakan ini bertujuan menghasilkan sistem peringatan dini yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pencegahan, pengendalian, dan penanganan konflik sosial di tingkat lokal. Dalam struktur pemerintahan daerah, fungsi deteksi dini dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis di bidang kewaspadaan nasional, serta Kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum yang berhadapan langsung dengan masyarakat di tingkat paling bawah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Indeks sistem peringatan dini konflik dapat digunakan sebagai instrumen penting dalam pencegahan konflik sebelum berubah menjadi kekerasan terbuka, dengan memperhatikan faktor-faktor identitas sosial yang sering menjadi pemicu konflik di masyarakat (Suyono, 2020). Namun, efektivitas implementasinya di tingkat lokal sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarlembaga yang terlibat serta ketersediaan standar operasional prosedur (SOP) yang baku (Samudro et al., 2024). Sinergi antara Bakesbangpol dan FKDM sangat diperlukan dalam upaya preventif untuk meminimalisir potensi konflik di daerah (Hakim & Dewanti, 2020).

Kabupaten Lombok Timur memiliki posisi strategis sekaligus rentan terhadap konflik sosial politik. Wilayah ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi tersebut. Berdasarkan data internal Bakesbangpol Lombok Timur tren konflik sosial politik di wilayah tersebut selama periode 2020–2025 menunjukkan fluktuasi yang dinamis. Penurunan jumlah konflik dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pencegahan, namun peningkatan kembali pada tahun 2024 hingga terjadi lonjakan signifikan di tahun 2025 mengindikasikan bahwa potensi konflik masih bersifat laten. Data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Viqi, 2024) menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan tertinggi di provinsi NTB, yaitu

mencapai 2.057 TPS. Konflik di tahun 2025 didominasi oleh aksi unjuk rasa yang menuntut transparansi pengelolaan dana desa, dugaan penyimpangan anggaran pemerintah daerah, serta ketegangan antara masyarakat dengan kepala desa. Berdasarkan penelitian (Lestari & Utama, 2025) pelaksanaan deteksi dini di Kabupaten Lombok Timur menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama.

Kecamatan Sikur merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Lombok Timur dengan tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi, baik dari aspek agama, budaya, maupun orientasi politik. Berbagai peristiwa konflik telah terjadi di kecamatan ini, antara lain demonstrasi warga Desa Sikur Barat yang menuntut transparansi penggunaan Dana Desa (Radar Lombok, 2025) kasus pelanggaran politik (Tipilu) di Desa Kembang Kuning (ANTARA, 2024), penolakan proyek SPAM Pantai Selatan di Desa Kotaraja (NTB Pos, 2023), serta demonstrasi warga Montong Baan Selatan yang menuntut transparansi pengelolaan dana COVID-19 (Sindo News, 2020). Beberapa contoh konflik tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar pada tiga dimensi masalah mendasar: kelemahan sistem tata kelola pemerintahan desa, pola relasi kuasa antara kepala desa dan warga, serta keterbatasan ruang dialog antara pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Sikur, mekanisme pelaporan dan respons FKDM kecamatan terhadap potensi konflik masih perlu ditingkatkan agar lebih proaktif, serta alur pelaporan antara FKDM, kecamatan, dan Bakesbangpol perlu lebih ditingkatkan. Penelitian tentang sinergi antara Kecamatan dan Bakesbangpol dalam deteksi dini konflik sosial politik di tingkat lokal masih terbatas, sementara peran FKDM sangat strategis dalam mencegah konflik sosial di daerah (Lestari & Utama, 2025)

Penelitian tentang efektivitas deteksi dini konflik menunjukkan bahwa keberhasilan sistem peringatan dini sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas sektor, ketersediaan standar operasional prosedur (SOP) yang baku, serta kualitas sumber daya manusia dalam menganalisis potensi kerawanan (Samudro et al., 2024). Sinergi kelembagaan antara kecamatan dan Bakesbangpol sebagai kerangka analitis menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis hubungan antara koordinasi lintas lembaga, alur informasi, dan efektivitas deteksi dini konflik dalam konteks pemerintahan daerah. Ortiz (2016) menegaskan bahwa sistem deteksi dini konflik hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh tiga dimensi utama yaitu pengumpulan informasi (*information collection*), analisis informasi (*information analysis*), dan respons dini (*early response*), yang ketiganya sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar lembaga serta alur informasi yang berjenjang dan berkelanjutan. Berdasarkan kerangka teoretis dan kondisi empiris tersebut, penelitian ini hadir untuk menganalisis secara kritis pelaksanaan deteksi dini konflik sosial politik di Kecamatan Sikur serta sinergi antara Kecamatan Sikur dan Bakesbangpol dalam merespon pelaksanaan deteksi dini tersebut, guna memberikan gambaran ilmiah yang komprehensif mengenai sejauh mana mekanisme deteksi dini mampu berkontribusi nyata terhadap pencegahan konflik sosial politik di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan masih tingginya potensi konflik sosial politik di Kabupaten Lombok Timur, sementara fungsi deteksi dini yang melibatkan sinergi antara Kecamatan Sikur dan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi sejumlah tantangan.

Berdasarkan data internal Bakesbangpol Lombok Timur (2025), tren konflik sosial politik di wilayah tersebut menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2025, didominasi oleh aksi unjuk rasa terkait dana desa dan ketegangan antara masyarakat dengan kepala desa. Beberapa peristiwa konflik di Kecamatan Sikur, seperti demonstrasi warga Desa Sikur Barat yang menuntut transparansi Dana Desa serta penolakan proyek SPAM Pantai Selatan di Desa Kotaraja menunjukkan bahwa potensi konflik di wilayah ini masih tinggi. Sementara itu, berdasarkan temuan awal di lapangan, mekanisme pelaporan dan respon terhadap potensi konflik di Kecamatan Sikur belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal koordinasi lintas lembaga dan alur informasi yang berjenjang. Padahal, dalam upaya pencegahan konflik di suatu wilayah, koordinasi yang terintegrasi dan alur informasi yang jelas merupakan faktor kunci yang sangat diperlukan.

Berbagai penelitian mengenai deteksi dini konflik sosial politik telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus kajian. Penelitian (Lestari & Utama, 2025) mengkaji pelaksanaan deteksi dan cegah dini konflik berbasis agama oleh Bakesbangpol Lombok Timur dengan fokus pada faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. (Samudro et al., 2024) membahas sistem deteksi dini konflik sosial melalui pendekatan Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS) pada tingkat provinsi dengan menitikberatkan pada mekanisme kelembagaan kewaspadaan dini. Sementara itu, (Ramadhan & Ahmad, 2023) serta (Prihartono et al., 2025) meneliti implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam menangani konflik sosial pada level kelurahan dan kecamatan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam memahami pelaksanaan deteksi dini konflik sosial, sebagian besar masih berfokus pada efektivitas satu lembaga tertentu, implementasi kebijakan kewaspadaan dini, atau mekanisme kerja FKDM. Penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji bagaimana sinergi antar-lembaga pemerintahan, khususnya antara Kecamatan dan Bakesbangpol, dibangun dalam setiap tahapan deteksi dini konflik yang meliputi pengumpulan informasi, analisis informasi, dan respons dini sebagaimana dikemukakan Ortiz (2016)

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa keterbatasan kajian yang menganalisis hubungan koordinasi kelembagaan, alur informasi, serta pola respons antar-lembaga dalam sistem deteksi dini konflik sosial politik pada tingkat kecamatan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis sinergi Kecamatan Sikur dan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan deteksi dini konflik sosial politik.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih terbatasnya kajian ilmiah yang secara khusus menganalisis sinergi antara Kecamatan dan Bakesbangpol dalam pelaksanaan deteksi dini konflik sosial politik di tingkat kecamatan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tata kelola pemerintahan dan studi politik lokal. Selain itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan deteksi dini konflik sosial politik di Kecamatan Sikur serta sinergi antara Kecamatan dan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur sebagai dasar perumusan perbaikan yang lebih terarah. Tanpa penelitian ini, pemerintah daerah akan kehilangan landasan objektif untuk menilai apakah mekanisme deteksi dini yang telah berjalan sudah cukup optimal atau masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi lintas lembaga, alur informasi, dan standardisasi prosedur.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks deteksi dini konflik dan peran kelembagaan dalam pencegahan konflik sosial politik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian tentang deteksi dini konflik memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan.

Penelitian pertama dilakukan oleh (Lestari & Utama, 2025) dengan judul *Deteksi dan Cegah Dini dalam Pencegahan Konflik Sosial Berbasis Agama oleh Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan struktural dan kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi dini di Lombok Timur masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lestari & Utama terletak pada lokus yang sama yaitu Kabupaten Lombok Timur serta objek kajian pada Bakesbangpol. Perbedaannya, penelitian Lestari & Utama berfokus pada konflik berbasis agama, sementara penelitian ini berfokus pada sinergi kecamatan dan Bakesbangpol dalam deteksi dini konflik sosial politik secara umum. Keterbatasan penelitian tersebut adalah hanya berfokus pada satu lembaga (Bakesbangpol) tanpa mengkaji peran kecamatan, serta tidak menganalisis tahapan deteksi dini secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi keterbatasan tersebut dengan mengkaji sinergi antara Kecamatan Sikur dan Bakesbangpol secara stimulan.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Samudro et al., 2024) dengan judul *Sistem Deteksi Dini dalam Pencegahan Konflik Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* dengan kerangka CEWERS (*Conflict Early Warning Early Response System*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem deteksi dini di DIY berjalan melalui pemetaan potensi konflik, penguatan Kominda, FKDM, FKUB, serta Jaga Warga, namun masih ditemukan kelemahan pada analisis risiko dan koordinasi antar lembaga. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sistem deteksi dini dan peran FKDM. Perbedaannya terletak pada lokus (DIY vs Lombok Timur) serta metode yang digunakan (*literature review* vs kualitatif deskriptif lapangan). Keterbatasan penelitian Samudro et al. adalah tidak melakukan observasi dan wawancara langsung di lapangan,

sehingga tidak dapat menangkap dinamika aktual sinergi antar lembaga di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan data primer dari wawancara langsung dan observasi di lapangan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Suyono, 2020) dengan judul *Conflict Early Warning System Index as a Preventive Effort*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan psikologi sosial konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks deteksi dini konflik di Kulon Progo berada pada kategori tinggi, namun konflik masih bersifat laten. Penelitian ini menegaskan bahwa *early warning system* dapat digunakan sebagai instrumen penting dalam pencegahan konflik sebelum berubah menjadi kekerasan terbuka. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengakui pentingnya deteksi dini sebagai upaya preventif. Perbedaannya terletak pada metode (kuantitatif vs kualitatif), lokus (Kulon Progo vs Lombok Timur), serta fokus (indeks psikologis vs sinergi kelembagaan). Keterbatasan penelitian Suyono adalah tidak mengkaji aspek kelembagaan dan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaan deteksi dini. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi aspek kelembagaan yang belum terjawab oleh pendekatan kuantitatif tersebut.

Penelitian keempat dilakukan oleh (Prihartono et al., 2025) dengan judul *Implementasi Kebijakan Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat di Kecamatan Jagakarsa*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKDM berperan sebagai mata dan telinga pemerintah dalam mengidentifikasi potensi konflik, namun masih terdapat hambatan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kapasitas anggota FKDM. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti FKDM di tingkat kecamatan. Perbedaannya terletak pada lokus (Kecamatan Jagakarsa, DKI Jakarta vs Kecamatan Sikur, Lombok Timur) serta fokus (implementasi kebijakan FKDM vs sinergi kecamatan dan Bakesbangpol). Keterbatasan penelitian Prihartono et al. adalah tidak mengkaji hubungan koordinasi antara FKDM dengan kecamatan dan Bakesbangpol secara berjenjang. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis alur informasi yang berjenjang antara FKDM, kecamatan, dan Bakesbangpol.

Penelitian kelima dilakukan oleh (Ramadhan & Ahmad, 2023) dengan judul *Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Menangani Konflik Sosial di Kelurahan Warakas Jakarta Utara*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKDM menjalankan fungsi deteksi dini melalui pemetaan potensi konflik dan koordinasi dengan lurah serta aparat keamanan, namun masih terkendala keterbatasan fasilitas dan pelatihan anggota. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peran FKDM dalam deteksi dini konflik. Perbedaannya terletak pada lokus (Kelurahan Warakas, Jakarta Utara vs Kecamatan Sikur, Lombok Timur) serta fokus (implementasi FKDM di kelurahan vs sinergi kecamatan-kesbangpol). Keterbatasan penelitian Ramadhan & Ahmad adalah tidak menganalisis bagaimana sinergi antara FKDM dengan pemerintah kecamatan dan Bakesbangpol dalam sistem deteksi dini yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji sinergi kelembagaan secara utuh dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masih berfokus pada satu lembaga tunggal (Kesbangpol atau FKDM) dan belum mengkaji

sinergi antar-lembaga pemerintahan. Penelitian ini berbeda karena secara khusus menganalisis sinergi antara Kecamatan Sikur dan Bakesbangpol Lombok Timur dalam setiap tahapan deteksi dini konflik sosial politik menggunakan kerangka EWRS Ortiz (2016). Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian tentang koordinasi lintas lembaga dan alur informasi berjenjang dalam sistem deteksi dini di tingkat lokal.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini pada tiga hal. Pertama, secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan kerangka EWRS Ortiz (2016) ke dalam konteks deteksi dini konflik sosial politik di tingkat pemerintahan lokal. Kedua, secara substantif, penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu lembaga tunggal seperti penelitian terdahulu, tetapi mengkaji sinergi dua institusi sekaligus (Kecamatan dan Bakesbangpol) beserta alur informasi yang berjenjang di antara keduanya. Ketiga, secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif post-positivisme yang menggali data dari dua level pemerintahan (kecamatan dan kabupaten) secara simultan, sehingga mampu mengidentifikasi titik-titik putusnya koordinasi dan alur informasi yang tidak dapat dijelaskan oleh penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian deteksi dini konflik sosial politik yang lebih berorientasi pada sinergi kelembagaan.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergi antara Kecamatan Sikur dan Badan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur dalam deteksi dini konflik sosial politik di wilayah Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode kualitatif deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam fenomena sinergi kelembagaan antara Kecamatan Sikur dan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur dalam deteksi dini konflik sosial politik. Paradigma post-positivisme dipilih karena memandang realitas sosial bersifat kompleks dan dinamis, sehingga memerlukan pemahaman mendalam melalui interpretasi terhadap konteks sosial yang diteliti (Creswell, 2016). Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik sinergi kelembagaan dan mekanisme deteksi dini yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2022). Simangunsong (2017) juga menegaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif dalam pemerintahan digunakan untuk memahami realitas sosial secara mendalam dengan menelusuri makna, nilai, dan proses yang terjadi di balik suatu fenomena pemerintahan, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif terhadap dinamika kebijakan publik dan kelembagaan. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menangkap kompleksitas fenomena sinergi antar lembaga, alur informasi, koordinasi, serta dinamika deteksi dini konflik yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap sepuluh

informan yang dipilih secara purposive sampling dan snowball sampling berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam pelaksanaan deteksi dini konflik sosial politik. Informan tersebut terdiri dari Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan tertinggi dalam kebijakan kewaspadaan dini di tingkat kabupaten; Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik sebagai pelaksana teknis deteksi dini; Camat Sikur sebagai pemimpin tertinggi di tingkat kecamatan; Kasi Trantib Kecamatan Sikur sebagai pelaksana harian penanganan konflik; Ketua FKDM Kabupaten Lombok Timur sebagai koordinator forum kewaspadaan di tingkat kabupaten; Satu Orang FKDM Kecamatan sebagai pelaksana deteksi dini di lapangan; serta empat orang masyarakat Kecamatan Sikur sebagai penerima manfaat dan pengamat langsung dinamika konflik. Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi kebijakan (Kabupaten), pelaksana teknis (Kecamatan dan FKDM), serta penerima manfaat dan pengamat sosial (masyarakat).

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mentransformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, dan bagan yang menggambarkan mekanisme pelaksanaan deteksi dini serta pola sinergi antara Kecamatan Sikur dan Bakesbangpol. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, didasarkan pada pola, tema, dan hubungan makna yang muncul dari data yang telah dianalisis.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sikur dan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya potensi konflik sosial politik di Kecamatan Sikur serta masih lemahnya sinergi antara kecamatan dan Bakesbangpol dalam pelaksanaan deteksi dini konflik. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih 1bulan, yaitu pada bulan Januari 2026, yang mencakup proses observasi awal, perizinan penelitian, pelaksanaan wawancara mendalam terhadap para informan, pengumpulan dokumentasi kegiatan program dan data konflik, serta verifikasi data akhir. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi sinergi kelembagaan dan pelaksanaan deteksi dini konflik secara aktual dan kontekstual sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Sinergi Kecamatan Sikur dan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur dalam deteksi dini konflik sosial politik menggunakan kerangka dari Ortiz (2016) dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu pengumpulan informasi, analisis informasi, dan respon. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pengumpulan Informasi

Dimensi pengumpulan informasi dalam deteksi dini konflik merujuk pada proses pemantauan, penghimpunan data, pencatatan, registrasi, validasi, serta pemantauan situasi secara berkelanjutan untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini (Ortiz, 2016). Dalam konteks penelitian ini, pengumpulan informasi dimaknai sebagai sejauh mana mekanisme

pengumpulan data potensi konflik di Kecamatan Sikur berjalan secara sistematis dan melibatkan berbagai aktor terkait.

Menurut Ortiz (2016) pengumpulan informasi merupakan fondasi sistem deteksi dini yang harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan melalui mekanisme pemantauan, pencatatan, validasi, dan registrasi informasi. Berdasarkan temuan lapangan, mekanisme pengumpulan informasi potensi konflik di Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui laporan FKDM ke Bakesbangpol via WhatsApp atau langsung ke kantor. Namun, temuan ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar Ortiz karena tidak adanya SOP baku yang mengatur mekanisme tersebut. Akibatnya, kualitas informasi sangat bergantung pada kapasitas individu pelapor, bukan pada sistem yang terstandarisasi.

Ortiz (2016) juga menekankan bahwa pencatatan dan registrasi informasi harus dilakukan secara berkelanjutan (*continuous*) agar tercipta database historis yang dapat digunakan untuk analisis pola konflik. Namun, temuan lapangan justru menunjukkan sebaliknya: pencatatan konflik di Kecamatan Sikur terhenti sejak tahun 2022, dan tidak ada dokumentasi tertulis tentang konflik yang terjadi selama tiga tahun terakhir. Hal ini mengakibatkan hilangnya memori institusional (*institutional memory*) sehingga setiap kali terjadi konflik, aparat harus "memulai dari nol" tanpa bisa merujuk pada data historis.

Selanjutnya, Ortiz (2016) menggarisbawahi pentingnya validasi informasi melalui verifikasi lintas sumber untuk memastikan akurasi data sebelum ditindaklanjuti. Di lapangan, proses validasi dilakukan melalui metode 60%-40% yang diterapkan FKDM. Meskipun metode ini menunjukkan adanya upaya verifikasi, namun tidak didasarkan pada indikator terukur sehingga bersifat subjektif. Temuan ini mengindikasikan bahwa dimensi pengumpulan informasi dalam sistem deteksi dini di Kecamatan Sikur belum berjalan sesuai standar ideal Ortiz (2016)

Berdasarkan temuan penelitian, respon yang dilakukan oleh Kecamatan Sikur dan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur menunjukkan adanya komitmen untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan dialog dan musyawarah. Namun demikian, dalam perspektif Ortiz (2016) respon yang efektif tidak hanya ditandai oleh kemampuan menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung, tetapi juga kemampuan melakukan tindakan preventif sebelum konflik berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem EWRS tidak diukur dari seberapa cepat konflik diselesaikan setelah terjadi, melainkan seberapa mampu sistem tersebut mencegah konflik agar tidak mencapai tahap eskalasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan masih didominasi oleh pendekatan responsif setelah adanya laporan atau munculnya konflik di masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi early response belum terintegrasi secara penuh dengan proses pengumpulan dan analisis informasi sebelumnya. Menurut Ortiz (2016), hubungan antara information collection, information analysis, dan early response harus membentuk suatu siklus yang saling berkaitan. Ketika kualitas pengumpulan informasi dan analisis informasi masih lemah, maka respon yang dihasilkan cenderung bersifat spontan, tidak terencana, dan berorientasi jangka pendek. Akibatnya, penyelesaian konflik yang dilakukan

belum mampu menyentuh akar permasalahan sehingga potensi konflik serupa tetap muncul kembali pada waktu dan lokasi yang berbeda.

Peneliti menyimpulkan bahwa dimensi pengumpulan informasi dalam deteksi dini konflik di Kecamatan Sikur belum berjalan optimal, ditandai dengan tidak adanya SOP baku, terhentinya pencatatan konflik sejak tahun 2022, validasi tanpa instrumen terstandar, serta pemantauan yang masih bersifat reaktif.

3.2. Analisis Informasi

Dimensi analisis informasi dalam deteksi dini konflik merujuk pada proses pengolahan data yang telah dikumpulkan menjadi pemahaman yang komprehensif mengenai penyebab konflik, aktor yang terlibat, dinamika yang berkembang, serta kemungkinan eskalasi konflik (Ortiz, 2016). Dalam konteks penelitian ini, analisis informasi dimaknai sebagai sejauh mana Kecamatan Sikur dan Kesbangpol mampu menganalisis potensi konflik secara sistematis dan mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik Kesbangpol, analisis penyebab konflik yang dilakukan masih bersifat umum dan belum sampai pada identifikasi akar masalah struktural. Jenis konflik yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur selama periode 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Jenis Konflik di Kabupaten Lombok Timur (2020-2025)

Jenis Konflik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Aksi Unjuk Rasa/demo	5	4	5	1	3	25	43
Konflik dengan Pemerintah Desa	8	6	3	2	4	8	31
Sengketa tamah/lahan	7	6	3	2	2	7	27
Penolakan proyek/kebijakan	4	3	2	1	2	8	20
Konflik sosial/perkelahian warga	2	2	11	2	1	3	11
Total	26	21	14	8	12	51	132

Sumber: Rekapan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur (2020-2025) diolah oleh peneliti

Tabel di atas menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa/demo merupakan jenis konflik paling dominan (43 kejadian), diikuti konflik dengan pemerintah desa (31 kejadian), dan sengketa tanah/lahan (27 kejadian). Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2025 dengan 51 kejadian. Hasil wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan Sikur mengungkapkan bahwa penyebab konflik yang paling sering adalah kebijakan pemerintah desa yang tidak transparan, terutama terkait dana desa. Hasil observasi lapangan memperkuat temuan ini, di mana konflik dana desa

terjadi berulang di berbagai desa di Kecamatan Sikur dengan pola yang hampir identik: masyarakat menuntut transparansi, pemerintah desa tidak responsif, lalu terjadi demo atau penyegelan kantor desa. Analisis aktor konflik masih terbatas pada identifikasi pelaku utama tanpa pemetaan yang sistematis. Aktor yang paling sering terlibat dalam konflik di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.
Aktor yang Sering Terlibat dalam Konflik di Kabupaten Lombok Timur (Januari 2025 - Maret 2026)

Aktor	Jumlah Keterlibatan	Jenis Konflik
Mahasiswa (BEM, HMI, PMII, IMM, LMND, KAMMI, FMN, GPMA, dll)	35 kejadian	Aksi unjuk rasa kebijakan pusat/daerah, penolakan RUU, tuntutan transparansi
Masyarakat dan pemuda desa	25 kejadian	Tuntutan dana desa, penolakan proyek, penyegelan kantor desa
LSM/Lembaga (GPS, KASTA, ALPA, ALARAM, dll)	12 kejadian	Dugaan korupsi, transparansi kebijakan, tuntutan kinerja pemerintah
Nelayan dan petani	8 kejadian	Kebijakan perikanan (VMS), harga pupuk, tuntutan hak
Aparat keamanan (TNI/Polri)	50 kejadian	Pengamanan aksi unjuk rasa, mediasi konflik, pengawalan demo
Pemerintah desa	20 kejadian	Pengelolaan dana desa, kebijakan pembangunan desa

Sumber: Rekapan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur (Januari 2025 - Maret 2026) diolah oleh peneliti, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa mahasiswa dari berbagai organisasi merupakan aktor yang paling sering terlibat dalam konflik (35 kejadian), terutama dalam aksi unjuk rasa. Aparat keamanan tercatat terlibat dalam 50 kejadian, namun perannya lebih sebagai pengaman dan mediator. Hasil wawancara dengan Ketua FKDM Kabupaten Lombok Timur mengungkapkan bahwa FKDM kecamatan langsung menelusuri dan mendatangi pihak-pihak yang terlibat untuk mencari tahu permasalahan dan keinginan mereka. Namun, tidak ada format baku yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil analisis aktor.

Analisis prospektif atau skenario konflik belum dilakukan sama sekali. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, pendekatan yang digunakan masih bersifat reaktif, yaitu menangani konflik yang sudah terjadi dengan melakukan pertemuan di lapangan dan mencari solusi dengan mendengarkan keinginan kedua belah pihak. Tidak ada dokumen skenario konflik, indikator peringatan dini, atau perencanaan kontijensi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa analisis informasi yang dilakukan Kecamatan Sikur dan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur masih berorientasi pada identifikasi peristiwa yang telah terjadi, belum sampai pada analisis mendalam terhadap pola, akar penyebab, serta kemungkinan perkembangan konflik di masa mendatang. Dalam perspektif Ortiz (2016) information analysis tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengidentifikasi mengapa konflik terjadi, siapa aktor yang terlibat, serta bagaimana kemungkinan konflik tersebut berkembang apabila tidak segera ditangani. Dengan demikian, analisis informasi seharusnya menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan preventif.

Kondisi di Kecamatan Sikur menunjukkan bahwa proses analisis masih bersifat reaktif karena fokus pada penyelesaian kasus yang sedang berlangsung tanpa disertai pemetaan risiko dan penyusunan skenario konflik. Akibatnya, informasi yang berhasil dikumpulkan belum sepenuhnya diubah menjadi peringatan dini yang mampu memprediksi potensi eskalasi konflik. Dalam kerangka Ortiz (2016), lemahnya analisis prospektif menyebabkan sistem deteksi dini kehilangan fungsi antisipatifnya dan hanya berperan sebagai alat dokumentasi kejadian. Oleh karena itu, kelemahan pada dimensi information analysis menjadi faktor penting yang menjelaskan mengapa konflik dengan pola serupa terus berulang di wilayah Kecamatan Sikur.

Peneliti menyimpulkan bahwa dimensi analisis informasi dalam deteksi dini konflik di Kecamatan Sikur belum optimal, mengingat analisis penyebab konflik tidak membedakan akar masalah struktural dengan pemicu, identifikasi aktor hanya sebatas mencari pelaku utama, analisis dinamika dan wacana tidak sistematis, serta tidak adanya analisis skenario konflik.

3.3. Respon

Dimensi respon dalam deteksi dini konflik merupakan tahap yang membedakan *Early Warning System* (EWS) dari *Early Warning and Response System* (EWRS). (Ortiz, 2016) menegaskan bahwa tujuan akhir dari deteksi dini bukanlah sekadar memberi peringatan, melainkan tindakan pencegahan yang nyata. Dalam konteks penelitian ini, respon dimaknai sebagai sejauh mana Kecamatan Sikur dan Bakesbangpol mampu merumuskan alternatif tindakan, melakukan intervensi sebelum konflik eskalatif, serta memiliki kejelasan tindakan pencegahan jangka pendek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Sikur, tindakan pencegahan yang dilakukan adalah musyawarah dan pendekatan humanis. Penanganan konflik dilakukan dengan cara turun ke lapangan bersama Babinsa dan Danramil, berdialog dengan pihak yang terlibat, kemudian bermusyawarah mencari solusi bersama. Seluruh pihak dilibatkan dan didengarkan. Kasi Trantib Kecamatan Sikur menjelaskan alur penanganan konflik secara lebih rinci, dimulai dari laporan warga, verifikasi kebenaran informasi, koordinasi dengan Forkopicam (Camat, Kapolsek, Danramil), kemudian turun ke lapangan. Mekanisme berjenjang ini menunjukkan upaya intervensi sedini mungkin, namun sistem masih bergantung pada inisiatif warga untuk melapor sehingga bersifat pasif, bukan proaktif.

Terdapat beberapa kelemahan dalam dimensi respon ini. Pertama, perumusan alternatif respon tidak dilakukan secara sistematis. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, penanganan konflik dilakukan

langsung dengan pertemuan di lapangan. Tidak ada dokumen tertulis yang memuat opsi-opsi respon dan analisis biaya-manfaat.

Kedua, tidak ada indikator baku untuk menentukan kapan tindakan harus diambil. Keputusan untuk bertindak sangat bergantung pada penilaian subjektif petugas, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi penanganan antar wilayah atau antar waktu.

Ketiga, tidak ada kombinasi tindakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Tindakan yang dilakukan hampir seluruhnya bersifat jangka pendek (mediasi, musyawarah, pendekatan humanis). Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa setelah konflik reda, tidak dilakukan upaya-upaya struktural untuk mencegah konflik serupa terulang kembali. Hal ini terbukti dari pola konflik dana desa yang berulang di berbagai desa di Kecamatan Sikur dengan pola yang hampir identik.

Pola musiman konflik di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan lonjakan signifikan pada Triwulan IV 2025 (32 kejadian) dan Januari 2026 (20 kejadian). Pola ini mengindikasikan keterkaitan antara lonjakan konflik dengan agenda politik dan siklus anggaran. Namun, tanpa sistem analisis dinamika konflik yang sistematis, antisipasi terhadap pola musiman tersebut sulit dilakukan secara terencana.

Berdasarkan temuan penelitian, respon yang dilakukan oleh Kecamatan Sikur dan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur menunjukkan adanya komitmen untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan dialogis dan musyawarah. Namun demikian, dalam perspektif Ortiz (2016), respon yang efektif tidak hanya ditandai oleh kemampuan menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung, tetapi juga kemampuan melakukan tindakan preventif sebelum konflik berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem EWRS tidak diukur dari seberapa cepat konflik diselesaikan setelah terjadi, melainkan seberapa mampu sistem tersebut mencegah konflik agar tidak mencapai tahap eskalasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan masih didominasi oleh pendekatan responsif setelah adanya laporan atau munculnya konflik di masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi early response belum terintegrasi secara penuh dengan proses pengumpulan dan analisis informasi sebelumnya. Menurut Ortiz (2016), hubungan antara information collection, information analysis, dan early response harus membentuk suatu siklus yang saling berkaitan. Ketika kualitas pengumpulan informasi dan analisis informasi masih lemah, maka respon yang dihasilkan cenderung bersifat spontan, tidak terencana, dan berorientasi jangka pendek. Akibatnya, penyelesaian konflik yang dilakukan belum mampu menyentuh akar permasalahan sehingga potensi konflik serupa tetap muncul kembali pada waktu dan lokasi yang berbeda.

Peneliti menyimpulkan bahwa dimensi respon dalam deteksi dini konflik di Kecamatan Sikur belum optimal, mengingat perumusan tindakan dilakukan spontan tanpa alternatif, intervensi baru dilakukan setelah konflik muncul (reaktif), tidak ada panduan baku, serta tidak ada kombinasi tindakan jangka pendek, menengah, dan panjang.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan deteksi dini konflik sosial politik di Kecamatan Sikur menunjukkan bahwa fungsi kewaspadaan dini belum berjalan optimal. Peneliti menemukan temuan penting yakni tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) baku, terhentinya pencatatan konflik sejak tahun 2022, pemantauan yang bersifat reaktif, serta tidak adanya indikator baku dalam analisis informasi. Akibatnya, konflik dengan pola yang sama cenderung berulang.

Sama halnya dengan temuan (Lestari & Utama, 2025) bahwa deteksi dini di Kabupaten Lombok Timur belum optimal karena tidak adanya jadwal pemantauan, temuan penelitian ini memperkuat bahwa kelemahan dalam aspek pemantauan proaktif merupakan persoalan struktural di wilayah tersebut. amun berbeda dengan Lestari & Utama yang hanya berfokus pada konflik berbasis agama dan peran Bakesbangpol, penelitian ini melampauinya dengan mengungkap akar masalah yang lebih fundamental, yaitu putusnya alur informasi karena FKDM melapor langsung ke Bakesbangpol tanpa melalui kecamatan, serta terhentinya pelaporan bulanan dari kecamatan ke Bakesbangpol sejak tahun 2022. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi temuan Lestari & Utama, tetapi juga memperdalamnya dengan menemukan penyebab struktural dari lemahnya koordinasi yang selama ini belum teridentifikasi.

Berbeda dengan temuan (Suyono, 2020) yang mengembangkan indeks deteksi dini berbasis identitas sosial dan prasangka sebagai prediktor terukur, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penilaian penyelesaian konflik di tingkat lokal masih menggunakan pendekatan sederhana dengan metode 60%-40% yang belum didasarkan pada indikator yang terukur. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif seperti yang digunakan Suyono memang penting untuk mengukur tingkat kerawanan, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas dinamika kelembagaan dan alur informasi di tingkat lokal yang hanya dapat diungkap melalui pendekatan kualitatif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa deteksi dini konflik sosial politik membutuhkan tidak hanya instrumen pengukuran, tetapi juga pemahaman mendalam tentang mekanisme kelembagaan yang mendasarinya.

Layaknya temuan (Rohwerder, 2015) bahwa pemerintah masih cenderung lebih fokus pada penanganan konflik setelah terjadi daripada pada deteksi dini, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa intervensi baru dilakukan setelah konflik muncul, tanpa upaya antisipatif berbasis analisis prospektif. Temuan ini memperkuat peringatan Rohwerder bahwa tanpa sistem deteksi dini yang berfungsi, konflik akan terus berulang karena akar masalahnya tidak pernah terselesaikan. Namun demikian, penelitian ini melengkapi temuan Rohwerder dengan mengidentifikasi secara spesifik mengapa hal tersebut terjadi di tingkat lokal, yaitu karena tidak adanya analisis skenario dan perencanaan kontijensi yang menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki kesiapan menghadapi potensi konflik di masa depan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kerangka EWRS Ortiz (2016) relevan dan dapat dioperasionalisasikan untuk menganalisis deteksi dini konflik sosial politik di tingkat pemerintahan lokal. Kedua, penelitian ini memperkaya kerangka EWRS dengan mengidentifikasi bahwa efektivitas ketiga dimensinya (pengumpulan informasi, analisis informasi, dan respon) sangat bergantung pada kualitas sinergi kelembagaan dan alur informasi

yang berjenjang. Ketiga, penelitian ini menawarkan konsep tentang sistem informasi yang berjenjang sebagai prasyarat mutlak bagi efektivitas deteksi dini, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi empiris sekaligus teoretis bagi pengembangan kajian deteksi dini konflik sosial politik di tingkat pemerintahan lokal.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan beberapa faktor penghambat pelaksanaan deteksi dini konflik sosial politik di Kecamatan Sikur. Pertama, tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan informasi potensi konflik. Kedua, tidak berjalannya alur informasi secara berjenjang karena FKDM melapor langsung ke Bakesbangpol sedangkan kecamatan Sikur tidak mendapat laporan dari FKDM kecamatan. Ketiga, terhentinya laporan bulanan dari kecamatan ke Bakesbangpol sejak tahun 2022 karena tidak ada permintaan laporan. Keempat, tidak adanya indikator baku dalam menganalisis potensi konflik, sehingga metode 60%-40% yang digunakan belum memiliki standar pengukuran yang jelas. Kelima, pemantauan situasi di kecamatan sikur hanya dilakukan secara reaktif ketika ada laporan, bukan melalui jadwal rutin yang terjadwal.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan deteksi dini konflik sosial politik di Kecamatan Sikur belum berjalan optimal karena lemahnya sinergi kelembagaan dan putusnya alur informasi berjenjang antara kecamatan dan Bakesbangpol. Akibatnya, potensi konflik tidak terdeteksi secara dini dan konflik dengan pola yang sama cenderung berulang. Temuan ini memperkuat sekaligus memperdalam penelitian terdahulu dengan mengungkap bahwa akar masalahnya terletak pada lemahnya sinergi kelembagaan dan putusnya alur informasi berjenjang antara kecamatan dan kesbangpol. Guna meningkatkan efektivitas deteksi dini, disarankan untuk menyusun SOP baku, mengaktifkan kembali pencatatan dan pelaporan konflik secara rutin, serta menata ulang alur informasi yang berjenjang dari FKDM ke kecamatan kemudian ke kesbangpol.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan utama. Pertama, keterbatasan waktu penelitian yang relatif singkat sehingga peneliti tidak dapat melakukan observasi dan pemantauan dinamika konflik dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kedua, tidak terdokumentasikannya data konflik di Kecamatan Sikur karena laporan bulanan dari kecamatan ke Bakesbangpol telah terhenti sejak tahun 2022, sehingga peneliti kesulitan mengakses data historis untuk menganalisis pola konflik secara komprehensif. Ketiga, tidak adanya konflik terbaru di Kecamatan Sikur pada saat penelitian berlangsung, sehingga penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah, waktu penelitian, dan ketersediaan data sehingga temuan yang dihasilkan belum dapat menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan deteksi dini konflik sosial politik pada seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dengan cakupan kecamatan yang lebih luas di Kabupaten Lombok Timur, serta menambahkan analisis kuantitatif untuk mengukur efektivitas sistem deteksi dini konflik

secara lebih mendalam. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) secara lebih spesifik, mengingat posisi dan efektivitas FKDM sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat kecamatan masih menjadi persoalan yang belum terjawab dalam penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur beserta jajarannya, serta Camat Sikur beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Anwar Rosshad, S.H, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan selama penyusunan skripsi ini. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alexandra, L. A., & Satria, A. (2023, February). Indonesia's collective violence trends in 2022: Less common, more lethal. Centre for Strategic and International Studies. https://csis.or.id/publication/indonesias-collective-violence-trends-in-2022-less-common-more-lethal/

ANTARA News. (2022, January 6). Menteri PPPA: Konflik sosial berdampak buruk bagi perempuan dan anak. https://www.antaranews.com/berita/2627913/menteri-pppa-konflik-sosial-berdampak-buruk-bagi-perempuan-dan-anak

ANTARA. (2024, February 1). Kades Kembang Kuning Lotim divonis tiga bulan penjara kasus tipilu. *ANTARA News*. https://mataram.antaranews.com/berita/323160/kades-kembang-kuning-lotim-divonis-tiga-bulan-penjara-terkait-kasus-tipilu

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur. (2025). Rekapan konflik sosial politik Kabupaten Lombok Timur tahun 2020–2025 [Dokumen arsip internal tidak dipublikasikan].

Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.

Eviany, E. (2019). *Pengantar ilmu politik dan ruang lingkupnya*. CV Cendekia Press. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1273/

Hakim, L., & Dewanti, E. (2020). Partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencegah konflik sosial pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration Journal*, 4(1), 69-82. https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/view/1736

Hegre, H., Allansson, M., Basedau, M., Colaresi, M., Croicu, M., Fjelde, H., Hultman, L., Melander, E., Mouhleb, N., Öberg, M., Schutte, S., & Nygård, H. M. (2019). *VIEWS: A political violence early-warning system. Journal of Peace Research,* 56(2), 155-174. https://doi.org/10.1177/0022343319823860

Indra, Nazara, S., Hartono, D., & Sumarto, S. (2019). Roles of income polarization, income inequality and ethnic fractionalization in social conflicts: An empirical study of Indonesian provinces, 2002–2012. *Asian Economic Journal*, *33*(2), 165–190. https://doi.org/10.1111/asej.12179

Lestari, N., & Utama, L. S. (2025). Deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama oleh Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Innovation Research and Knowledge (JIRK), 5(1), 165–176.* https://doi.org/10.53625/jirk.v5i1.10312

NTB Pos. (2023, May 23). Ratusan massa dari berbagai kalangan datangi kantor Desa Kotaraja dan lokasi proyek SPAM. https://www.ntbpos.com/peristiwa/5158965172/ratusan-massa-dari-berbagai-kalangan-datangi-kantor-desa-kotaraja-dan-lokasi-proyek-spam

Ortiz, C. L. (2016). *Practical guide: Early warning and response systems design for social conflicts*. United Nations Development Programme (UNDP) & Organization of American States (OAS). https://www.undp.org/latin-america/publications/practical-guide-early-warning-and-response-systems-design-social-conflicts

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. (2019). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/127904/permendagri-no-46-tahun-2019

Prihartono, D., Nugraha, M. Q., Noer, K. U., & Izzatusholekha. (2025). Implementasi kebijakan kewaspadaan dini masyarakat dalam penyelesaian konflik masyarakat di Kecamatan Jagakarsa. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 124-135. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.22320

Radar Lombok. (2025, January 23). Diduga selewengkan DD, Kades Sikur Barat didemo. https://radarlombok.co.id/diduga-selewengkan-dd-kades-sikur-barat didemo.html

Ramadhan, A. A., & Ahmad, M. (2023). Implementasi forum kewaspadaan dini masyarakat dalam menangani konflik sosial di Kelurahan Warakas Jakarta Utara. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 108-122. https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/projip/article/view/666

Rohwerder, B. (2015). Conflict early warning and early response (GSDRC Helpdesk Research Report No. 1118). Institute of Development Studies. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/12949

Samudro, E. G., Sjamsoeddin, S., & Santoso, A. (2024). Sistem deteksi dini dalam pencegahan konflik sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Civil and Military Cooperation Journal*, 1(1),11-18. https://journal.civiltary.com/index.php/civiltary/article/download/2/2

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.

Sindo News. (2020, July 8). Ratusan warga demo minta Pemdes transparan kelola dana desa. https://daerah.sindonews.com/read/94196/174/ratusan-warga-demo-minta-pemdes-transparan-kelola-dana-desa-1594188437

Soekanto, S. (2017). *Sosiologi suatu pengantar* (48th ed.). Rajawali Pers.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Suyono, H. (2020). Conflict early warning system index as a preventive effort. Journal of Educational, Health and Community Psychology, 9(1), 145–162. https://doi.org/10.12928/jehcp.v9i1.15297

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315. https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/267

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Viqi, A. (2024, November 22). Bawaslu catat 6.001 TPS rawan di NTB, terbanyak Lombok Timur. *Detik Bali*. https://www.detik.com/bali/pilkada/d-7651937/bawaslu-catat-6-001-tps-rawan-di-ntb-terbanyak-lombok-timur

Wieviorka, M. (2013). Social conflict. Current Sociology, 61(5–6), 696–713. https://doi.org/10.1177/0011392113499487